

# Pengaruh Fungsi Manajemen terhadap Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Stunting di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara

## *The Role of Management Functions in Enhancing Community Empowerment for Stunting Prevention in Batu Bara District*

Herlina Sianturi<sup>1\*</sup>, Reni Aprinawaty Sirait<sup>2</sup>, Raisha Octavariny<sup>3</sup>, Karnirius Harefa<sup>4</sup>

<sup>1,2</sup>Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam

Jln. Sudirman No.38 Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara – Indonesia-061- 20243

Email: [herlinasianturi09@gmail.com](mailto:herlinasianturi09@gmail.com)

### Abstrak

Stunting merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang masih menjadi tantangan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Batu Bara. Keberhasilan penanggulangan stunting tidak hanya ditentukan oleh intervensi teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas fungsi manajemen serta tingkat pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh fungsi dasar manajemen terhadap pemberdayaan masyarakat dalam upaya penanggulangan stunting di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara. Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif analitik dengan pendekatan cross-sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah tenaga pelaksana program stunting dan kader posyandu sebanyak 250 orang, dengan sampel 167 responden yang dipilih menggunakan teknik proportional random sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Analisis data dilakukan secara univariat, bivariat menggunakan uji Chi-square, dan multivariat menggunakan regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh aspek fungsi dasar manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat ( $p < 0,001$ ). Variabel pengawasan merupakan faktor paling dominan (PR = 5,84), diikuti oleh pelaksanaan (PR = 5,70), perencanaan (PR = 4,32), dan pengorganisasian (PR = 3,23). Disimpulkan bahwa fungsi dasar manajemen memiliki peran penting dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan stunting. Oleh karena itu, diperlukan penguatan fungsi manajemen, khususnya pada aspek pengawasan dan pelaksanaan, untuk meningkatkan efektivitas program penanggulangan stunting.

**Kata kunci:** Fungsi manajemen; pemberdayaan masyarakat; stunting; kesehatan masyarakat; stunting

A Stunting remains a major public health problem in Indonesia, including in Batu Bara District. The success of stunting reduction is not only determined by technical interventions but is also influenced by the effectiveness of management functions and the level of community empowerment. This study aims to analyze the effect of basic management functions on community empowerment in stunting prevention efforts in the working area of the Batu Bara District Health Office. This study employed an analytical quantitative design with a cross-sectional approach. The population consisted of 250 stunting program implementers and posyandu cadres, with a sample of 167 respondents selected using proportional random sampling. Data were collected through a structured questionnaire that had been tested for validity and reliability. Data analysis was conducted using univariate, bivariate (Chi-square test), and multivariate (logistic regression) analyses. The results showed that all aspects of management functions planning, organizing, actuating, and controlling, had a significant effect on community empowerment ( $p < 0.001$ ). The most dominant variable was controlling (PR = 5.84), followed by actuating (PR = 5.70), planning (PR = 4.32), and organizing (PR = 3.23). In conclusion, management functions play an important role in enhancing community empowerment in stunting prevention. Therefore, strengthening management functions, particularly in controlling and actuating, is necessary to improve the effectiveness of stunting prevention programs.

**Keywords:** Management functions; community empowerment; stunting; public health; stunting prevention

\*Corresponding Author: Herlina Sianturi, Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam, Deli Serdang, Indonesia

E-mail : [herlinasianturi09@gmail.com](mailto:herlinasianturi09@gmail.com)

Doi : 10.35451/zssjx722

Received : April 20, 2026. Accepted: April 27, 2026. Published: April 30, 2026

Copyright (c) 2026 : Herlina Sianturi. Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International

## **1. PENDAHULUAN**

Stunting masih menjadi salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang utama di negara berkembang, termasuk Indonesia. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis yang berlangsung dalam jangka panjang, terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)[1]. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik berupa tinggi badan yang tidak sesuai dengan usia, tetapi juga berimplikasi pada gangguan perkembangan kognitif, penurunan kapasitas belajar, peningkatan risiko penyakit tidak menular, serta penurunan produktivitas di masa dewasa. Oleh karena itu, stunting tidak hanya menjadi masalah kesehatan, tetapi juga menjadi isu strategis dalam pembangunan sumber daya manusia dan ekonomi suatu negara[2]. Secara global, prevalensi stunting masih tergolong tinggi meskipun menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir[3]. Di Indonesia, berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting pada balita masih berada pada angka 21,5% pada tahun 2023[3]. Meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, angka tersebut masih jauh dari target nasional sebesar 14% sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024[4]. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan stunting masih memerlukan penguatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan [5]

Di tingkat daerah, permasalahan stunting menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Provinsi Sumatera Utara, termasuk Kabupaten Batu Bara, masih menghadapi tantangan dalam menurunkan angka stunting. Data menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Kabupaten Batu Bara masih berada di atas target nasional, yang mengindikasikan bahwa intervensi yang dilakukan belum sepenuhnya efektif. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat multidimensional, seperti rendahnya akses terhadap pangan bergizi, kondisi sanitasi yang kurang memadai, keterbatasan akses layanan kesehatan, serta faktor sosial ekonomi dan pendidikan masyarakat[6].

Selain faktor tersebut, aspek tata kelola program kesehatan juga menjadi determinan penting dalam keberhasilan penanggulangan stunting. Pelaksanaan program yang tidak optimal seringkali disebabkan oleh lemahnya fungsi manajemen dalam organisasi pelaksana. Fungsi dasar manajemen yang meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling) merupakan elemen kunci dalam memastikan efektivitas program kesehatan masyarakat. Penerapan fungsi manajemen yang baik memungkinkan pengalokasian sumber daya secara efisien, koordinasi lintas sektor yang efektif, serta monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan[7],[8]. Dalam konteks penanggulangan stunting, fungsi perencanaan berperan dalam menentukan prioritas intervensi berbasis data, pengorganisasian memastikan adanya koordinasi lintas sektor, pelaksanaan mendorong keterlibatan aktif pelaksana dan masyarakat, sedangkan pengawasan berfungsi untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kelemahan pada salah satu fungsi tersebut dapat menghambat keberhasilan program secara keseluruhan [9]

Salah satu pendekatan yang terbukti efektif dalam penanggulangan stunting adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kapasitas individu dan kelompok untuk berpartisipasi aktif dalam mengidentifikasi masalah, mengambil keputusan, serta melaksanakan tindakan yang berkaitan dengan kesehatan mereka. Dalam konteks stunting, pemberdayaan masyarakat berperan penting dalam mendorong perubahan perilaku terkait pola makan, pola asuh anak, sanitasi, serta pemanfaatan layanan kesehatan[10]

Namun, keberhasilan pemberdayaan masyarakat sangat bergantung pada dukungan sistem manajemen yang baik. Tanpa perencanaan yang matang, koordinasi yang efektif, pelaksanaan yang partisipatif, serta pengawasan yang berkelanjutan, upaya pemberdayaan masyarakat cenderung tidak berjalan optimal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kelemahan dalam fungsi manajemen, seperti kurangnya koordinasi lintas sektor dan minimnya pengawasan, dapat menurunkan efektivitas program pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan stunting[11].

Di Kabupaten Batu Bara, Dinas Kesehatan telah melaksanakan berbagai program penanggulangan stunting, seperti pemberian makanan tambahan, edukasi gizi, serta penguatan peran kader posyandu. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, antara lain perencanaan program yang belum sepenuhnya

berbasis data, koordinasi lintas sektor yang belum optimal, serta keterlibatan masyarakat yang masih rendah di beberapa wilayah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi program di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penanggulangan stunting tidak hanya bergantung pada intervensi teknis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh efektivitas fungsi manajemen dalam pelaksanaan program serta tingkat pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pengaruh fungsi dasar manajemen terhadap pemberdayaan masyarakat dalam upaya penanggulangan stunting di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan tata kelola program kesehatan masyarakat serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif analitik dengan pendekatan cross-sectional untuk menganalisis pengaruh fungsi dasar manajemen terhadap pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan stunting di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. Populasi penelitian terdiri dari 250 tenaga pelaksana program dan kader posyandu, dengan sampel sebanyak 167 responden yang dipilih menggunakan teknik proportional random sampling. Variabel independen meliputi fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, sedangkan variabel dependen adalah pemberdayaan masyarakat. Data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur berbasis skala Likert yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Analisis data dilakukan secara bertahap meliputi analisis univariat, bivariat menggunakan uji Chi-square, serta analisis multivariat menggunakan regresi logistik untuk mengidentifikasi faktor dominan yang memengaruhi pemberdayaan masyarakat. Seluruh hasil dianalisis pada tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$ .

## 3. HASIL

### Hasil Analisis Univariat

Adapun hasil analisis univariat dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1. Distribusi frekuensi Hasil analisis Univariat

No	Karakteristik	f	%
1	Jenis kelamin		
	Laki-laki	62	37,1
	Perempuan	105	62,9
2	Usia		
	21-35 tahun	74	44,3
	36-50 tahun	93	55,7
3	Pendidikan		
	SMA	25	15,0
	D-III/S1/S2	142	85,0
4	Lama bekerja		
	≤5 tahun	51	30,5
	>5 tahun	116	69,5

Sumber: Hasil Penelitian

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa jenis kelamin responden mayoritas berjenis kelamin perempuan sebanyak 62,9%. Sebanyak 55,7% responden berusia 36-50 tahun. Ditinjau dari pendidikan, sebanyak 85% responden berpendidikan D-III/S1/S2. Berdasarkan lama pekerjaan, sebanyak 69,5% responden memiliki lama pekerjaan >5 tahun.

Tabel 1.2 Distribusi Frekuensi Fungsi Dasar Manajemen Masyarakat Dalam Upaya Penanggulangan Stunting

No	Fungsi dasar manajemen	f	%
1	Perencanaan		
	Kurang baik	62	37,1
	Baik	105	62,9
2	Pengorganisasian		
	Kurang baik	74	44,3
	Baik	93	55,7
3	Pelaksanaan		
	Kurang baik	25	15,0
	Baik	142	85,0
4	Pengawasan		
	Kurang baik	78	46,7
	Baik	89	53,3
5	Pemberdayaan masyarakat dalam upaya penanggulangan stunting		
	Kurang baik	49	29,3
	Baik	118	70,7

Hasil Penelitian

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa berdasarkan fungsi dasar manajemen sebanyak 37,1% responden dengan perencanaan kurang baik, dan 62,9% dengan perencanaan yang baik. Ditinjau dari aspek pengorganisasian, sebanyak 44,3% responden dengan pengorganisasian yang kurang baik, dan 55,7% dengan pengorganisasian yang baik. Berdasarkan aspek pelaksanaan, sebanyak 15% responden dengan pelaksanaan yang kurang baik, dan 85,0% dengan pelaksanaan yang baik. Ditinjau dari aspek pengawasan, sebanyak 46,7% responden dengan pengawasan yang kurang baik, dan 53,3% dengan pengawasan yang baik. Berdasarkan pemberdayaan masyarakat dalam upaya penanggulangan stunting, sebanyak 29,3% responden dengan pemberdayaan yang kurang baik, dan 70,7% dengan pemberdayaan yang baik.

Hasil Analisis Bivariat

Tabel 1.2. Pengaruh Fungsi Dasar Manajemen terhadap Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Stunting

Variabel (Fungsi Manajemen)	Pemberdayaan Rendah n (%)	Pemberdayaan Tinggi n (%)	Total (n)	p-value	PR	95% CI
Perencanaan						
Kurang baik	33 (61,1)	21 (38,9)	54	<0,001	4,32	2,614-7,126
Baik	16 (14,2)	97 (85,8)	113			
Pengorganisasian						
Kurang baik	31 (53,4)	27 (46,6)	58	<0,001	3,23	1,991-5,260
Baik	18 (16,5)	91 (83,5)	109			
Pelaksanaan						
Kurang baik	38 (60,3)	25 (39,7)	63	<0,001	5,70	3,150-10,325
Baik	11 (10,6)	93 (89,4)	104			
Pengawasan						

Variabel (Fungsi Manajemen)	Pemberdayaan rendah n (%)	Ren- Pemberdayaan Tinggi n (%)	Total (n)	p-value	PR	95% CI
Kurang baik	41 (52,6)	37 (47,4)	78	<0,001	5,84	2,922-11,704
Baik	8 (9,0)	81 (91,0)	89			

Sumber: Hasil olah Penelitian

Berdasarkan tabel analisis bivariat menunjukkan hubungan antara fungsi dasar manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan) dengan pemberdayaan masyarakat dalam upaya penanggulangan stunting di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara, adalah pada aspek perencanaan, dari 54 responden yang menilai perencanaan kurang baik, sebagian besar yaitu 61,1% memiliki tingkat pemberdayaan masyarakat yang rendah, sedangkan 38,9% memiliki pemberdayaan tinggi. Sebaliknya, pada responden dengan perencanaan yang baik (113 responden), mayoritas yaitu 85,8% memiliki pemberdayaan masyarakat yang tinggi dan hanya 14,2% yang rendah. Hasil uji statistik menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara perencanaan dan pemberdayaan masyarakat ( $p < 0,001$ ) dengan nilai PR sebesar 4,32 (95% CI: 2,614–7,126), yang berarti bahwa responden dengan perencanaan yang kurang baik memiliki risiko 4,32 kali lebih besar untuk memiliki pemberdayaan masyarakat yang rendah dibandingkan dengan responden dengan perencanaan yang baik., selanjutnya pada aspek pengorganisasian, dari 58 responden dengan pengorganisasian yang kurang baik, sebanyak 53,4% memiliki pemberdayaan rendah dan 46,6% tinggi. Sementara itu, dari 109 responden dengan pengorganisasian yang baik, sebesar 83,5% memiliki pemberdayaan tinggi dan 16,5% rendah. Hasil uji Chi-square menunjukkan hubungan yang signifikan ( $p < 0,001$ ) dengan nilai PR sebesar 3,23 (95% CI: 1,991–5,260), yang menunjukkan bahwa pengorganisasian yang kurang baik meningkatkan risiko rendahnya pemberdayaan masyarakat sebesar 3,23 kali. Diikuti pada aspek pelaksanaan, dari 63 responden dengan pelaksanaan yang kurang baik, sebesar 60,3% memiliki pemberdayaan rendah dan 39,7% tinggi. Sebaliknya, pada responden dengan pelaksanaan yang baik (104 responden), sebanyak 89,4% memiliki pemberdayaan tinggi dan hanya 10,6% yang rendah. Hasil analisis menunjukkan hubungan yang signifikan ( $p < 0,001$ ) dengan nilai PR sebesar 5,70 (95% CI: 3,150–10,325), yang berarti bahwa pelaksanaan yang kurang baik meningkatkan risiko rendahnya pemberdayaan masyarakat sebesar 5,70 kali. Kemudian pada aspek pengawasan, dari 78 responden dengan pengawasan yang kurang baik, sebesar 52,6% memiliki pemberdayaan rendah dan 47,4% tinggi. Sementara itu, pada responden dengan pengawasan yang baik (89 responden), sebesar 91,0% memiliki pemberdayaan tinggi dan hanya 9,0% yang rendah. Hasil uji statistik menunjukkan hubungan yang signifikan ( $p < 0,001$ ) dengan nilai PR sebesar 5,84 (95% CI: 2,922–11,704), yang menunjukkan bahwa pengawasan yang kurang baik memiliki risiko terbesar terhadap rendahnya pemberdayaan masyarakat dibandingkan dengan variabel lainnya. Secara keseluruhan, seluruh aspek fungsi dasar manajemen memiliki hubungan yang signifikan dengan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan stunting. Di antara keempat variabel tersebut, pengawasan merupakan faktor yang paling dominan, diikuti oleh pelaksanaan, perencanaan, dan pengorganisasian. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan fungsi manajemen, maka semakin tinggi tingkat pemberdayaan masyarakat dalam mendukung program penanggulangan stunting.

### Analisis Multivariat

Tabel 1.3. Analisis Multivariat Pengaruh Fungsi Dasar Manajemen terhadap Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Stunting Pengobatan TB Paru

Variabel	Nilai P	PR	95%CI	
			Rendah	Tinggi
Perencanaan	<0,001	13,7	4,367	43,265
Pengorganisasian	0,002	19	3,138	40,109
Pelaksanaan	0,001	10,7	3,071	38,201
Pengawasan	<0,001	13,7	4,060	46,621

Sumber: Hasil Penelitian

Analisis multivariat menunjukkan bahwa variabel yang dominan berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat dalam upaya penanggulangan stunting adalah variabel pengawasan ( $p = <0,001$ ;  $PR = 13,7$ ;  $95\% \text{ CI } 4,060 - 46,621$ ). Hal ini berarti bahwa responden dengan aspek pengawasan yang kurang baik memiliki kecenderungan 13,7 kali lebih besar untuk memiliki pemberdayaan masyarakat yang rendah dalam upaya penanggulangan stunting dibandingkan dengan responden yang memiliki aspek pengawasan yang baik. Berdasarkan hasil analisis multivariat, dapat disimpulkan bahwa seluruh fungsi dasar manajemen berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat, dengan pengawasan sebagai faktor paling dominan, diikuti oleh pelaksanaan, perencanaan, dan pengorganisasian.

#### **4. PEMBAHASAN**

Hasil analisis univariat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai fungsi dasar manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan) berada dalam kategori baik, namun masih terdapat proporsi responden yang menilai fungsi manajemen belum optimal. Selain itu, tingkat pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan stunting sebagian besar berada pada kategori sedang hingga tinggi, meskipun masih ditemukan kelompok masyarakat dengan tingkat pemberdayaan yang rendah. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi program penanggulangan stunting di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal dalam mendorong pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh. Kondisi ini dapat disebabkan oleh variasi dalam kualitas pelaksanaan fungsi manajemen di tingkat lapangan, khususnya dalam hal perencanaan berbasis data, koordinasi lintas sektor, serta keberlanjutan program.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Fatmawati et al. (2025) yang menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan stunting memerlukan pendekatan yang sistematis melalui peningkatan kapasitas, partisipasi aktif masyarakat, serta evaluasi berkelanjutan terhadap program yang dijalankan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program pemberdayaan sangat dipengaruhi oleh kualitas implementasi program dan keterlibatan stakeholder secara aktif[12]. Selain itu, penelitian oleh Tyarini et al. (2024) juga menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui edukasi gizi, peningkatan akses sanitasi, serta pemantauan pertumbuhan anak dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan stunting. Namun, efektivitas program tersebut sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan dan dukungan dari tenaga kesehatan serta kader di lapangan[13].

Hasil ini juga didukung oleh penelitian Suharto et al. (2023) yang menemukan bahwa intervensi berbasis pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui pelatihan kader posyandu, mampu meningkatkan perilaku pencegahan stunting secara signifikan. Namun demikian, penelitian tersebut menekankan bahwa keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh kualitas pelaksanaan program, termasuk perencanaan yang matang dan pengawasan yang berkelanjutan[14]. Lebih lanjut, hasil systematic literature review oleh Kemal & Permana (2024) menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan stunting umumnya dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu peningkatan kesadaran, peningkatan kapasitas, dan kemandirian masyarakat. Namun, berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi, dan rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi hambatan utama dalam implementasi program di berbagai daerah[15]. Temuan dalam penelitian ini juga konsisten dengan penelitian Astuti et al. (2023) yang menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat berbasis pendekatan terpadu (integrated approach), termasuk dukungan teknologi dan ketahanan pangan, dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pencegahan stunting. Namun, keberhasilan program tersebut memerlukan dukungan manajemen yang kuat serta keterlibatan aktif berbagai sektor[16].

Berdasarkan perbandingan dengan penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa meskipun tingkat pemberdayaan masyarakat dalam penelitian ini relatif cukup baik, masih terdapat ruang untuk peningkatan, terutama melalui penguatan fungsi manajemen program kesehatan. Fungsi manajemen yang belum optimal berpotensi menjadi faktor penghambat dalam meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan stunting. Dengan demikian, hasil analisis univariat ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas fungsi manajemen, khususnya dalam perencanaan berbasis data, koordinasi lintas sektor, serta pengawasan yang berkelanjutan, sangat penting untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan efektivitas program penanggulangan stunting.

Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa seluruh aspek fungsi dasar manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemberdayaan

masyarakat dalam upaya penanggulangan stunting ( $p < 0,001$ ). Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan fungsi manajemen, maka semakin tinggi tingkat pemberdayaan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan teori manajemen yang menyatakan bahwa integrasi fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan merupakan kunci keberhasilan suatu program[7]. Pada aspek perencanaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan yang kurang baik meningkatkan risiko rendahnya pemberdayaan masyarakat sebesar 4,32 kali. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan berbasis data dan kebutuhan masyarakat sangat penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa perencanaan yang tidak optimal dapat menghambat efektivitas program kesehatan dan menurunkan keterlibatan masyarakat[17]. Pada aspek pengorganisasian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengorganisasian yang kurang baik meningkatkan risiko rendahnya pemberdayaan masyarakat sebesar 3,23 kali. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor dan pembagian tugas yang jelas sangat berperan dalam keberhasilan program. Penelitian lain menyatakan bahwa lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi salah satu faktor penghambat dalam implementasi program kesehatan masyarakat[18]. Pada aspek pelaksanaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan yang kurang baik meningkatkan risiko rendahnya pemberdayaan masyarakat sebesar 5,70 kali. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program yang tidak konsisten dan kurang melibatkan masyarakat dapat menghambat keberhasilan pemberdayaan. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan faktor utama dalam keberhasilan intervensi kesehatan[14]. Pada aspek pengawasan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan merupakan faktor yang paling dominan dengan risiko sebesar 5,84 kali terhadap rendahnya pemberdayaan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan sangat penting dalam memastikan keberhasilan program. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa pengawasan yang efektif dapat meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelaksanaan program kesehatan[19].

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi dasar manajemen memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan hasil systematic review yang menyatakan bahwa keberhasilan program pemberdayaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kualitas manajemen program, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang berkelanjutan[15]. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keempat fungsi dasar manajemen memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Di antara keempat variabel tersebut, pengawasan dan pelaksanaan merupakan faktor yang paling dominan, yang menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh perencanaan, tetapi juga oleh kualitas implementasi dan evaluasi program. Hasil ini memperkuat teori manajemen yang dikemukakan oleh Robbins dan Coulter (2021), yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu organisasi sangat bergantung pada integrasi yang baik antara fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam konteks kesehatan masyarakat, penerapan fungsi manajemen yang optimal dapat meningkatkan efektivitas program serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam penanggulangan masalah kesehatan, termasuk stunting.

Hasil analisis multivariat menunjukkan bahwa seluruh variabel fungsi dasar manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat dalam upaya penanggulangan stunting. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh satu aspek manajemen, tetapi merupakan hasil dari interaksi berbagai fungsi manajemen yang saling terintegrasi. Temuan ini sejalan dengan teori manajemen yang menyatakan bahwa efektivitas organisasi sangat ditentukan oleh kemampuan dalam mengintegrasikan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan secara sistematis[8]

Variabel pengawasan merupakan faktor yang paling dominan dalam penelitian ini ( $PR = 5,84$ ), yang menunjukkan bahwa pengawasan yang kurang baik secara signifikan meningkatkan risiko rendahnya pemberdayaan masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan sangat penting dalam memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan rencana serta mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Yuliasti, et al. (2023) yang menyatakan bahwa pengawasan yang efektif dapat meningkatkan akuntabilitas, kualitas implementasi program, serta memastikan keberlanjutan intervensi kesehatan masyarakat[20]. Selanjutnya, variabel pelaksanaan juga menunjukkan pengaruh yang kuat ( $PR = 5,70$ ), yang menegaskan bahwa implementasi program yang aktif, partisipatif, dan berkelanjutan sangat berperan dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan yang tidak optimal dapat menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dan kegagalan dalam mencapai tujuan program. Temuan ini didukung oleh penelitian Suharto et al. (2023) yang menunjukkan bahwa keberhasilan program pemberdayaan masyarakat sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap pelaksanaan program[14].

Variabel perencanaan juga berpengaruh signifikan ( $PR = 4,32$ ), yang menunjukkan bahwa perencanaan yang berbasis data dan kebutuhan masyarakat sangat penting dalam meningkatkan efektivitas program. Perencanaan yang tidak matang dapat menyebabkan ketidaktepatan sasaran program dan rendahnya keterlibatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian Renny Triwijayanti, dkk (2024) yang menyatakan bahwa perencanaan yang baik

merupakan dasar utama dalam meningkatkan efektivitas program kesehatan masyarakat[21]. Sementara itu, variabel pengorganisasian memiliki pengaruh signifikan dengan nilai PR sebesar 3,23, meskipun merupakan yang paling rendah dibandingkan variabel lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor dan pembagian tugas yang jelas tetap memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program. Penelitian oleh Melinda Y, et al. (2025) juga menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antar stakeholder dapat menghambat implementasi program kesehatan masyarakat.[18]

Secara keseluruhan, hasil analisis multivariat ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan dan pelaksanaan merupakan faktor yang paling dominan dalam memengaruhi pemberdayaan masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan program penanggulangan stunting tidak hanya bergantung pada perencanaan yang baik, tetapi juga pada kualitas implementasi dan evaluasi program secara berkelanjutan. Temuan ini diperkuat oleh hasil systematic review yang menyatakan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kualitas manajemen program secara keseluruhan, terutama pada aspek pelaksanaan dan evaluasi[15]

## 5. KESIMPULAN

- 1) Fungsi dasar manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sebagian besar telah berjalan dalam kategori baik, namun masih terdapat beberapa aspek yang belum optimal dalam pelaksanaan program penanggulangan stunting.
- 2) Tingkat pemberdayaan masyarakat dalam upaya penanggulangan stunting sebagian besar berada pada kategori sedang hingga tinggi, meskipun masih ditemukan kelompok masyarakat dengan tingkat pemberdayaan yang rendah.
- 3) Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa seluruh aspek fungsi dasar manajemen memiliki hubungan yang signifikan dengan pemberdayaan masyarakat, di mana fungsi manajemen yang kurang baik meningkatkan risiko rendahnya pemberdayaan masyarakat.
- 4) Hasil analisis multivariat menunjukkan bahwa seluruh fungsi dasar manajemen berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat, dengan aspek pengawasan sebagai faktor paling dominan, diikuti oleh pelaksanaan, perencanaan, dan pengorganisasian.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami ucapkan kepada kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara beserta seluruh jajaran yang telah memberikan izin dan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh tenaga kesehatan, kader posyandu, serta responden yang telah bersedia meluangkan waktu dan berpartisipasi dalam penelitian ini dan daat saya tuliskand alam publikasi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] W. H. Organization, "CHILD MALNUTRITION Key findings of the 2020 Joint Child Malnutrition Estimates," 2020.
- [2] U. Who and W. Bank, "Levels and trends in child malnutrition," 2023.
- [3] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia., "Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2023. Jakarta," 2023.
- [4] N. Kementerian Perencanaan Pembangunan, "Rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024," 2024.
- [5] R. Kementerian Kesehatan, "Survei Status Gizi Indonesia," 2025.
- [6] K. B. Bapennas, *Strategi Nasional Percepatan Penurunan Anak Kerdil ( Stunting)*. 2024.
- [7] R. S. Ubed, T. Raharjo, and A. A. Yudanto, *Konsep Manajemen*. 2021.
- [8] T. H. Handoko, *Manajemen*.
- [9] S. Prima Dewi Kusumawati, Johansyah, "Stunting , Faktor Determinan , Intervensi Multisektoral , Dinas Kesehatan Provinsi NTB ,," vol. 5, no. 10, pp. 2887–2902, 2026.
- [10] A. Rahman *et al.*, "Program Edukasi Kesadaran dan Pengetahuan Stunting Masyarakat Desa Meunasah Rayeuk Aceh Utara," vol. 1, no. 10, pp. 2423–2433, 2023.
- [11] R. A. Djazuli, *Evaluasi Program*. 2024.
- [12] F. Gaffar, K. Marzuki, and R. Amir, "Characteristic Community Empowerment Transformation to Prevent Stunting," vol. 12, no. 1, pp. 27–37, 2025.

- [13] I. A. Tyarini, A. Setiawati, R. Rahagia, and Y. Maidelwita, “Jurnal Pengabdian Masyarakat Edukasi Indonesia ( JPMEI ),” vol. 1, pp. 100–106, 2024, doi: 10.61099/jpmei.v1i3.56.
- [14] A. Suharto, B. J. Santosa, and S. Suparji, “Community Empowerment for Stunting Prevention : A Quasi-Experimental Study in Indonesia,” pp. 327–336, 2026, doi: 10.56338/mppki.v9i2.8952.
- [15] T. Kemal and I. Permana, “Systematic Literature Review on Community Empowerment in Preventing Stunting in Children : Challenges and Impacts,” vol. 04, no. 05, pp. 2171–2184, 2025.
- [16] E. F. A. Endah Puji Astuti, Krisna Mutiara Wati, Muhammad Erwan Syah and C. M. A. Shanti, Tri Sunarsih , Pudji Astuti, Sarmin, Andriyani Astuti, “Community empowerment in handling stunting through technology supporting food security and health,” vol. 9, no. 7, pp. 1078–1086, 2024.
- [17] I. Ayu, P. Genta, and P. K. Denpasar, “Pemberdayaan Masyarakat dan Intervensi Kesehatan Lingkungan terhadap Penanggulangan Stunting dan Penyakit Menular,” vol. 03, no. 02, pp. 197–212, 2024.
- [18] M. Y. Tompunu, J. I. C. Manoppo, and M. R. Sapulete, “Analisis Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting di Kota Manado,” vol. 5, 2025.
- [19] A. Kholid, Y. Sari, E. E. Stywati, W. Wawantoro, and B. I. Fitriani, “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Stunting Melalui Sosialisasi , Pemberian Makanan Tambahan dan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu,” pp. 1–6, 2022.
- [20] T. Yulianti, U. Muhammadiyah, and S. Rappang, “The Effectiveness of Hospital Management Information System Implementation in Improving Administrative Efficiency of Inpatient Services,” vol. 01, no. June, pp. 62–71, 2023.
- [21] R. Triwijayanti, A. Nurwanah, E. Juliandini, and M. Yusra, “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemenuhan Gizi Keluarga Melalui Inovasi ‘ NaNgKap ( Nugget Kangkung Ikan Kakap ),”” vol. 6, no. April, pp. 66–73, 2024.